

## Evaluasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik

\* Muctia Azizah<sup>1</sup>, Syafhendry<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author : [Muctiaazizah2@gmail.com](mailto:Muctiaazizah2@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini menjelaskan mengenai evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator penelitian yang digunakan pada penelitian ini ada 4 (empat) yaitu: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan). Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dari hasil wawancara maupun observasi dan dilengkapi dengan dokumentasi dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengelolaan PKH dilaksanakan dengan baik secara keseluruhan, tetapi masih ada kekurangan dalam proses seleksi KPM. Hal ini karena kurang selektifnya pemerintah desa dalam menentukan calon peserta PKH serta kurangnya koordinasi antara pendamping PKH dengan pemerintah desa dan Kepala Dusun dalam masalah pendataan sehingga masih terdapat salah sasaran dan masih terdapat masyarakat kurang mampu dan memiliki kriteria komponen belum mendapatkan bantuan PKH.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Program Keluarga Harapan, Pemberdayaan

### Abstract

This research explains the evaluation of the Family Hope Programme (PKH) in Banjar Guntung Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. There are 4 (four) research indicators used in this study, namely: *Planning*, *Organising*, *Actuating*, *Controlling*. The type of research located in Banjar Guntung Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singi Regency uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques used by interview, observation, and documentation. The data collected from interviews and observations and supplemented by documentation were analysed and then conclusions were drawn. Based on the results of this study, it is concluded that PKH management is carried out well overall, but there are still shortcomings in the KPM selection process. This is due to the lack of selectivity of the village government in determining prospective PKH participants and the lack of coordination between PKH assistants with the village government and the Hamlet Head in data collection issues so that there are still wrong targets and there are still underprivileged people and have component criteria that have not received PKH assistance.

**Keywords :** Evaluation, Family Hope Programme, Empowerment.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan terbelakang, termasuk Indonesia. Masalah ini sangat kompleks dan saling berkaitan, sehingga memerlukan penanganan yang menyeluruh. Salah satu faktor yang memperumit persoalan kemiskinan di Indonesia adalah adanya perbedaan kondisi yang cukup mencolok antar daerah dan komunitas masyarakat. Ketidakkonsistenan dalam distribusi pendapatan memperlebar jurang sosial yang sudah ada. Selain kemiskinan, pendidikan juga menjadi problem mendasar yang belum kunjung terselesaikan hingga kini. Sejak Indonesia merdeka, berbagai upaya telah dilakukan, namun solusi yang benar-benar efektif masih belum ditemukan. Oleh karena itu, pemerintah terus menempatkan isu kemiskinan dan pendidikan sebagai fokus utama yang harus segera diatasi. Kendala utama dalam menyelesaikan kedua permasalahan ini adalah luasnya wilayah Indonesia serta pembangunan infrastruktur yang belum merata, yang menyebabkan kesenjangan semakin sulit dijumpai.

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah memperkenalkan sebuah program khusus bernama Program Keluarga Harapan (PKH), yang mulai dijalankan sejak tahun 2007. Berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial (Depsos, 2020), PKH dirancang untuk memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga yang berada pada lapisan termiskin. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat tercapainya target-target Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs), seperti pengurangan angka kemiskinan ekstrem dan kelaparan, perluasan akses pendidikan dasar, mendorong kesetaraan gender, serta menurunkan tingkat kematian bayi, balita, dan ibu saat melahirkan.

Program ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan, baik dalam aspek fisik maupun nonfisik. Tujuan utama dari pembangunan tersebut adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat. Dalam alinea tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia bertugas melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Selain itu, setiap orang juga berhak mendapatkan pendidikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan seluruh umat manusia.

Adapun fenomena penelitian ini adalah dimana Desa Banjar Guntung merupakan salah satu desa yang warganya menerima bantuan PKH, namun masih ada beberapa bantuan PKH tersebut belum tepat sasaran. Selain itu, warga desa Banjar guntung yang menerima bantuan PKH masih cukup banyak dan harus diperhatikan. Selain itu, dari data yang penulis dapat, akses ekonomi sering terputus karena seringnya terjadi banjir apa lagi pada musim hujan datang menjadi poin penting dimana roda perekonomian di Desa Banjar Guntung yang sering ada masalah bahkan terhenti. Akses jalannya baru-baru ini diperbarui sebelumnya jalannya masih tanah kuning dan bergelombang adapun akses jalan utamanya yaitu penyeberangan perahu besar yang di namai oleh masyarakat setempat adalah kompong, walaupun perahunya besar Cuma bisa memuat beberapa motor saja tidak bisa di masuki mobil, ini dipergunakan khusus untuk anak sekolah di dahulukan.

Jadi alasan desa ini menjadi fokus perhatian karena yang seperti penulis tahu sulitnya akses ekonomi karena terbatasnya akses jalan penghubung, walau baru-baru ini akses jalan desa diperbaiki, tetapi masih ada kemungkinan masyarakat yang tertinggal dalam sektor ekonomi apalagi di desa ini sering banjir. Apabila terjadi banjir, akses jalannya memang benar-benar terputus, dan tidak ada akses jalan lain yang bisa masuk ke dalam desa ini karena jalannya digenangi air tidak bisa di lewati. Karna akses jalannya yang terputus para petani tidak bisa menjual hasil panennya kepasar maka penulis ikut menilai dan ikut melihat bagaimana berjalanya Program Keluarga Harapan di desa ini. Sebagai salah satu desa yang memiliki akses jalan yang cukup sulit, oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat di desa banjir guntung harus diperhatikan maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana program keluarga harapan di desa banjir guntung yang harus diperhatikan dan diteliti lebih lanjut. Maka dari itu peneliti mengusulkan judul penelitian “Evaluasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi” sebagai bahan evaluasi untuk desa dan evaluasi dalam menjalankan program PKH kedepannya terkhusus di Desa Banjar Guntung.

Adapun tujuan penelitian yang dapat diambil dari paragraf diatas yaitu: Untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang dimulai dari November 2024 – Mei 2025. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dikutip dalam Nanang Martono (2015) merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, koreprehensif dan atau holistik. Melalui jenis penelitian ini, bermaksud untuk menggambarkan bagaimana pencapaian pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banjar Guntung.

Metode Penetapan responden dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2016:92), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun pertimbangan tersebut adalah mereka yang terlibat secara langsung dengan variable penelitian. Jadi yang termasuk kedalam kriteria penelitian dan menjadi responden penelitian yaitu Kepala desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Pendamping PKH, Penerima PKH yang ada di Desa Banjar Guntung.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terus menerus sampai data itu jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan) dalam Moleong L. J (2017) merupakan sebuah proses mendapatkan informasi atau data menggunakan panca indra. Melalui observasi juga dapat diperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial

yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Banjar Guntung untuk mengamati secara langsung bagaimana hasil pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa tersebut.

- b. Interview (wawancara) dalam Raco, J.R (2018) merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seorang (informan atau responden). Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Desa Banjar Guntung, khususnya penerima manfaat PKH.
- c. Dokumentasi dalam Zainudin (2020) merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dalam kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, Mengambil gambar (foto) pelaksanaan penelitian, perekaman menggunakan tape recorder ketika pelaksanaan wawancara.

Menurut Taylor dan Boghan (1984) dalam Nanang Martono (2015:10) mendefinisikan analisis data sebagai sebuah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada hipotesis. Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Milles, Hubberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah kondensasi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Berikut proses analisis data dalam penelitian ini:

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dari metode yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, analisisnya terutama tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, data kaya rincian dan panjang.

#### 2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan. Pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan.

#### 3. Penyajian data

Penyajian data dimaknai oleh Yin (2018) sebagai kesimpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

#### 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dari beberapa tahap yang telah dilakukan dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta mengecek ulang dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan.

Dari Analisa data harus didapatkan indikator yang menjadi tolak ukur analisis yang akan di evaluasi. Empat indikator prinsip pengelolaan lingkungan yaitu POAC terdiri dari *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC). Analisis ini untuk mengetahui

pengelolaan serta pengawasan dari keberlangsungan program PKH. Dalam suatu pengelolaan, maka analisis POAC nya adalah:

- a. *Planning* (Perencanaan) adalah kegiatan perencanaan disusun dalam rangka pengelolaan atau proses pelaksanaan PKH di Desa Banjar Guntung
- b. *Organizing* (Pengorganisasian) yaitu adanya suatu bentuk organisasi yang jelas yang mengelola melaksanakan program PKH tersebut agar terus terlaksana sesuai mestinya
- c. *Actuating* (Pelaksanaan) yaitu ada suatu program yang dirancang harus dilaksanakan oleh peran *stakeholder*, kelembagaan, maupun masyarakat terkait
- d. *Controlling* (Pengawasan) yaitu berjalannya pengawasan agar pelaksanaan pengelolaan Program PKH dapat berjalan dengan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan serta mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial membuat Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini memiliki tujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki perilaku yang kurang mendukung. kesejahteraan kelompok miskin. Dengan adanya program ini diharapkan dapat dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan terutama pada pelayanan kesehatan bagi peserta PKH. Penulis memaparkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan yaitu pemilihan fakta-fakta dan usaha dalam menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain. Dalam melakukan Evaluasi pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi perlu adanya perencanaan agar dalam pencapaian tujuan program lebih terarah.

#### a. Menargetkan Sasaran

Setiap program bantuan sosial pada dasarnya memiliki kriteria sasaran tertentu agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga berlaku pada Program Keluarga Harapan (PKH), yang menetapkan bahwa penerima manfaat harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memenuhi kriteria berdasarkan komponen-komponen yang telah ditentukan dalam program tersebut.

Dalam konteks penentuan sasaran program PKH di tingkat lokal, data lapangan menunjukkan bahwa proses pendataan calon penerima manfaat dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa dianggap memiliki pengetahuan yang lebih mendalam terkait kondisi sosial dan ekonomi warganya. Dalam praktiknya, indikator seperti kondisi fisik rumah kerap dijadikan acuan awal. Namun demikian, indikator tersebut tidak selalu merepresentasikan keadaan ekonomi secara akurat. Misalnya, terdapat rumah yang tampak layak huni namun merupakan warisan dari orang tua, sementara ada pula rumah yang tampak tidak layak tetapi pemiliknya memiliki sumber daya ekonomi lain seperti lahan perkebunan.

Oleh karena itu, akurasi data dalam DTKS menjadi sangat penting dan pembaruan data secara berkala merupakan tanggung jawab pemerintah desa. Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan dapat terjadi apabila proses pembaruan data tidak

dilakukan secara selektif dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kriteria sasaran telah ditetapkan, tantangan dalam implementasi di lapangan tetap ada dan memerlukan perhatian serius.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banjar Guntung masih menghadapi permasalahan ketidaktepatan sasaran. Sekretaris Desa Banjar Guntung mengonfirmasi bahwa sebagian besar penerima bantuan memang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Namun, masih terdapat sejumlah kasus penerima yang tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh penggunaan data lama yang berasal dari tahun 2012, yang merujuk pada hasil survei sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010. Proses pembaruan data dan perbaikan sasaran memerlukan waktu yang cukup panjang, melibatkan musyawarah desa (musdes) dan prosedur administratif lainnya.

Dalam upaya menjaga ketepatan sasaran, pihak desa berharap agar penerima yang merasa tidak lagi layak secara ekonomi memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, sehingga kuota bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Namun, dalam praktiknya, kesadaran semacam ini sulit ditemukan.

Lebih lanjut, wawancara dengan Kepala Dusun di desa yang sama juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa penerima PKH yang secara ekonomi tergolong mampu. Kepala Dusun secara aktif memberikan saran kepada mereka agar bersedia mengundurkan diri demi memberi kesempatan kepada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan. Di sisi lain, terdapat pula warga yang memenuhi kriteria miskin namun belum tercakup dalam program PKH. Dalam situasi seperti ini, Kepala Dusun hanya dapat memberikan dukungan moral dan menyarankan warga tersebut untuk bersabar sambil menunggu proses pengusulan data melalui pemerintah desa.

Temuan ini menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran bantuan PKH di tingkat lokal masih menjadi tantangan, terutama akibat penggunaan data yang tidak mutakhir dan kurangnya kesadaran individu penerima dalam menilai kelayakan dirinya. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah desa dan tokoh masyarakat sangat penting dalam memperbaiki akurasi sasaran penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa Kepala Dusun telah berupaya memberikan saran serta masukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang tergolong mampu secara ekonomi agar secara sukarela mengundurkan diri dari program PKH. Langkah ini dimaksudkan agar bantuan tersebut dapat dialihkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, peneliti juga memperoleh informasi dari salah satu keluarga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima PKH. Keluarga tersebut menyampaikan adanya ketidakpuasan terhadap sistem penyaluran bantuan, karena merasa layak menerima bantuan namun tidak mendapatkannya. Mereka menilai bahwa terdapat ketidakadilan dalam distribusi bantuan, mengingat masih ada keluarga yang tergolong mampu namun tetap menerima manfaat dari program tersebut.

Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa masih terdapat keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH meskipun secara kondisi sangat membutuhkan, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Di sisi lain, wawancara yang dilakukan dengan salah satu penerima manfaat PKH menunjukkan bahwa bantuan yang diterima memberikan dampak positif yang signifikan. Bagi penerima yang benar-benar membutuhkan, bantuan PKH dirasakan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa program PKH memiliki manfaat yang nyata bagi kelompok sasaran yang tepat, namun masih diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penyaluran agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa bantuan PKH sangat bermanfaat bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan hanya saja masih terdapat keluarga yang memiliki ekonomi layak tetapi mendapatkan bantuan PKH sedangkan pada waktu yang bersamaan terdapat Keluarga Miskin (KM) yang tidak mendapatkan bantuan PKH. Hal tersebut dikarenakan terdapat data yang berasal dari survei lama serta kurang selektifnya pemerintah desa dalam memilih calon peserta PKH.

#### **b. Tepat Waktu Penyaluran**

Dalam pelaksanaan program bantuan sosial, ketepatan waktu penyaluran dana merupakan faktor penting agar program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan ketepatan waktu dalam penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH), hasil wawancara dengan Pendamping PKH Desa Banjar Guntung menunjukkan bahwa penyaluran dana telah dilakukan secara tepat waktu. Disebutkan bahwa dalam satu tahun terdapat empat periode penyaluran, yakni: periode pertama pada bulan Januari hingga Maret, periode kedua pada bulan April hingga Juni, periode ketiga pada bulan Juli hingga September, dan periode keempat pada bulan Oktober hingga Desember. Meskipun tanggal penyaluran dalam setiap periode dapat berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh penyesuaian dari pihak kementerian dan tidak mengganggu keseluruhan jadwal periodik. Penyesuaian tanggal umumnya terjadi pada awal tahun karena proses pemutakhiran data, namun keterlambatan yang melampaui batas periode jarang terjadi.

Informasi serupa juga diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Banjar Guntung. Ia menegaskan bahwa penyaluran dana bantuan PKH memang telah dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal periode, meskipun tanggal pasti sering kali tidak menentu. Kondisi ini kadang menimbulkan ketidaksabaran dari sebagian penerima manfaat karena ketidakpastian jadwal pencairan dana dalam satu periode tertentu. Sementara itu, salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga mengonfirmasi bahwa dalam satu tahun, penyaluran dilakukan sebanyak empat kali dan sejauh ini bantuan diterima sesuai dengan jadwal periodik yang telah ditetapkan.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber di lapangan, dapat disimpulkan bahwa secara umum penyaluran dana bantuan PKH telah berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal periodik tahunan. Meski demikian, ketidakpastian pada tanggal penyaluran di dalam masing-masing periode masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal komunikasi kepada penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni sebanyak empat kali dalam satu tahun.

Selain itu, peneliti juga memperoleh informasi dari salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait mekanisme pembuktian penerimaan dana bantuan. Dalam praktiknya, setelah mencairkan dana bantuan—yang umumnya dilakukan melalui layanan BRI Link—KPM diwajibkan untuk mengirimkan bukti berupa struk transaksi kepada Pendamping PKH. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk verifikasi bahwa proses pencairan dana benar-benar telah dilakukan oleh penerima yang bersangkutan. Dengan demikian, selain memastikan ketepatan waktu dalam penyaluran, mekanisme ini juga

menunjukkan adanya sistem kontrol administratif yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan tentang Evaluasi pengelolaan program keluarga harapan (PKH) di desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik kabupaten Kuantan Singingi bahwa penyaluran bantuan PKH sudah tepat pada waktunya, tetapi bulan dan tanggal nya berubah-ubah setiap periode tergantung instruksi dari kementerian sosial serta KPM yang telah mencairkan dana mengirim bukti trankaski kepada Pendamping PKH.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kesimpulan dari indikator *Planning* (Perencanaan) bahwa sasaran pada program keluarga harapan (PKH) sebagian besar sudah tepat sasaran tetapi masih terdapat beberapa keluarga yang berasal dari keluarga tergolong mampu oleh sebab itu secara komunikasi pemerintah desa harus terlibat dalam proses validasi data agar data yang diperoleh merupakan data yang sesuai dengan kondisi dilapangan. Selanjutnya untuk penyaluran dana bantuan PKH sudah tepat pada waktunya yaitu 4 (empat) periode dalam setahun. Periode pertama pada bulan januari, february, dan maret. Periode kedua bulan april, mei, juli. Periode ketiga bulan juli, agustus, dan September. Periode keempat bulan oktober, November, desember. Untuk tanggal dan bulanya tergantung pada instruksi dari kementerian. Kemudian bagi para KPM yang telah mencairkan dana harus mengirimkan bukti transaksi kepada Pendamping PKH untuk memastikan bahwa KPM telah mencairkan dana bantuan PKH.

## 2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian yaitu kegiatan yang menerapkan seluruh kegiatan yang harus dijalankan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab agar terwujud kesatuan usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

### a. Adanya Pembagian Tugas

Pembagian tugas merupakan strategi kerja yang bertujuan untuk membagi tanggung jawab secara terstruktur dalam suatu organisasi, sehingga setiap individu hanya fokus pada aktivitas tertentu sesuai dengan peran masing-masing, dan tidak menangani seluruh tugas secara menyeluruh. Dalam konteks pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banjar Guntung, hasil wawancara dengan pendamping PKH menunjukkan bahwa pembagian tugas telah dilakukan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program yang berlaku. Pendamping memiliki beberapa tanggung jawab utama, yaitu validasi data calon penerima, penyaluran bantuan, fasilitasi pertemuan kelompok, serta pelaksanaan verifikasi.

Validasi merupakan bagian awal dari proses pelaksanaan tugas, yang dilakukan untuk menentukan apakah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali dan dilakukan berdasarkan instruksi langsung dari pemerintah pusat agar seluruh data calon KPM terintegrasi dalam sistem nasional.

Setelah validasi dilakukan, penyaluran bantuan dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan, sebagaimana diatur dalam pedoman resmi program. Pendamping juga bertugas memfasilitasi pertemuan kelompok yang menjadi ruang partisipatif bagi penerima manfaat untuk menyampaikan saran, masukan, atau keluhan terkait pelaksanaan PKH. Selanjutnya, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa

bantuan yang diterima digunakan sesuai dengan kewajiban yang telah ditentukan bagi KPM, terutama terkait pemanfaatan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH di Desa Banjar Guntung telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan program. Kinerja pendamping tidak hanya terbatas pada interaksi dengan KPM, tetapi juga menjalin komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah desa sebagai bagian dari koordinasi pelaksanaan program di tingkat lokal.

Wawancara tambahan dengan Kepala Dusun memperkuat temuan ini, di mana disebutkan bahwa kehadiran pendamping di lapangan sering kali terlihat, khususnya saat melakukan pengecekan terhadap warga penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pendamping dan aparat desa berjalan dengan cukup baik.

Selain itu, pandangan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga mengindikasikan bahwa pendamping PKH dinilai memiliki sikap yang baik dan menjalankan tugasnya dengan profesional. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH di Desa Banjar Guntung telah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara optimal, baik dalam aspek administratif, sosial, maupun koordinatif di tingkat desa.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan tentang evaluasi pengelolaan program keluarga harapan (PKH) di desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi bahwa pendamping PKH telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik terutama aktif dengan KPM dan Pemerintah Desa Banjar guntung.

#### **b. Melakukan Koordinasi**

Koordinasi merupakan suatu proses penyesuaian atau sinkronisasi berbagai kepentingan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banjar Guntung, hasil wawancara dengan pendamping PKH menunjukkan bahwa koordinasi antara pendamping dan pemerintah desa telah terjalin, bahkan dengan intensitas komunikasi yang cukup baik. Namun demikian, efektivitas koordinasi ini sangat bergantung pada kesiapan dan responsivitas pihak desa. Ketika pemerintah desa bersikap tanggap, misalnya dengan menyediakan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dianggap sudah tidak lagi layak menerima bantuan, proses evaluasi dan penghapusan peserta oleh pendamping dapat berjalan lebih lancar.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Banjar Guntung, diketahui bahwa pendamping PKH selalu hadir dalam setiap kegiatan Musyawarah Desa (MusDes), yang menjadi wadah penting untuk pengambilan keputusan kolektif terkait program bantuan sosial. Hal ini menunjukkan komitmen pendamping dalam menjalankan peran koordinatifnya dalam forum-forum resmi desa.

Namun, temuan berbeda muncul ketika peneliti mewawancarai salah satu keluarga miskin yang tidak menerima bantuan PKH. Keluarga tersebut mengungkapkan bahwa jika koordinasi antara pemerintah desa dan ketua RT berlangsung dengan baik, maka penentuan penerima bantuan kemungkinan besar akan lebih akurat dan minim kesalahan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat celah dalam sistem koordinasi di tingkat bawah, khususnya antara perangkat desa dan tokoh masyarakat lingkungan seperti ketua RT atau kepala dusun.

Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan peneliti di lapangan terkait evaluasi pengelolaan program PKH di Desa Banjar Guntung, dapat disimpulkan bahwa

pendamping PKH telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan cukup baik. Namun, peran pemerintah desa masih kurang optimal, khususnya dalam hal proaktif menyampaikan informasi mengenai kondisi ekonomi peserta yang telah membaik kepada pendamping untuk dilakukan proses pemutakhiran data atau penghapusan dari daftar penerima.

Secara keseluruhan, dari hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa pada indikator organizing (pengorganisasian), pendamping PKH telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam struktur program. Meski demikian, koordinasi antara pendamping dan pemerintah desa belum berlangsung secara maksimal. Kelemahan juga terlihat pada kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan ketua RT, yang berdampak pada ketidaksesuaian data di lapangan dengan kondisi nyata masyarakat. Hal ini menjadi salah satu penyebab masih terjadinya kesalahan dalam penentuan sasaran penerima bantuan.

### **3. Actuating (Pelaksanaan)**

Pengarahan yaitu penepatan anggota pada kelompok supaya dapat bekerja secara sadar dalam usaha mencapai tujuan yang sudah ditetapkan selaras dengan perencanaan dan pola organisasi.

#### **a. Memberikan Pengarahan Kepada KPM**

Memberikan pengarahan merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan program, karena bertujuan untuk membantu peserta memahami arah tindakan yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping memiliki peran strategis dalam memberikan arahan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan.

Hasil wawancara dengan pendamping PKH di Desa Banjar Guntung menunjukkan bahwa pengarahan diberikan kepada peserta PKH dalam berbagai aspek, seperti saat terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program, dalam memenuhi kewajiban sesuai kriteria yang telah ditetapkan, serta dalam memahami dan mengikuti tujuan utama dari program PKH itu sendiri. Informasi serupa juga diperoleh dari wawancara lanjutan dengan pendamping lainnya, yang menyampaikan bahwa pengarahan secara rutin dilakukan, khususnya dalam forum pertemuan kelompok. Dalam forum ini, pendamping memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan informasi, memberikan pembinaan, serta memperjelas hak dan kewajiban peserta program.

Selain itu, wawancara dengan salah satu KPM juga menguatkan temuan tersebut. Pendamping memberikan arahan praktis kepada peserta, seperti pentingnya mengikuti kegiatan posyandu secara rutin guna memastikan kecukupan gizi dan kesehatan anak-anak dalam keluarga penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa pengarahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Banjar Guntung, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, dapat diketahui bahwa pengarahan dari pendamping PKH memang rutin dilakukan, terutama dalam pertemuan kelompok. Pengarahan ini mencakup penanganan kendala yang dihadapi peserta serta penegasan kembali terhadap tujuan dari program PKH. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH di desa tersebut telah menjalankan fungsi

pengarahan secara efektif, baik dalam konteks penyelesaian masalah maupun dalam membimbing KPM agar tetap berada dalam jalur tujuan program yang telah ditetapkan pemerintah.

#### **b. Menyampaikan Informasi Kepada KPM**

Menyampaikan informasi merupakan salah satu kegiatan penting dalam proses komunikasi, khususnya dalam konteks pelaksanaan program sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk membagikan pengetahuan atau pesan yang dianggap relevan dan bermanfaat kepada pihak lain. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banjar Guntung, pendamping PKH memainkan peran penting dalam menyampaikan berbagai informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penyampaian informasi dilakukan secara rutin oleh pendamping PKH, khususnya melalui forum pertemuan kelompok. Dalam forum tersebut, seluruh informasi yang berkaitan dengan PKH disampaikan secara langsung kepada peserta, termasuk informasi teknis seperti jadwal dan mekanisme penyaluran dana. Hal ini menjadi bentuk transparansi dan kontrol sosial agar peserta program memahami hak dan kewajibannya secara menyeluruh.

Pemerintah desa juga turut berperan dalam menyampaikan informasi terkait PKH kepada masyarakat. Sekretaris Desa Banjar Guntung menegaskan bahwa informasi mengenai program PKH secara aktif disosialisasikan kepada warga desa, baik secara langsung maupun melalui forum resmi desa.

Menariknya, dari hasil wawancara dengan salah satu keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan, diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan program PKH sudah cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai program tersebut telah menyebar dengan baik di lingkungan masyarakat, meskipun tidak semua warga menjadi penerima manfaat.

Sementara itu, dari keterangan salah satu KPM, diketahui bahwa pertemuan kelompok kini telah berlangsung secara rutin—khususnya pada hari Selasa di minggu pertama setiap bulan. Selain melalui forum tatap muka, pendamping PKH juga memanfaatkan media komunikasi digital, seperti aplikasi WhatsApp, untuk menyampaikan informasi secara cepat ketika terjadi perubahan mendadak atau informasi tambahan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH di Desa Banjar Guntung telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik dalam hal penyampaian informasi. Saluran informasi yang digunakan tidak hanya melalui pertemuan kelompok secara langsung, tetapi juga melalui komunikasi digital, yang memungkinkan penyebaran informasi lebih cepat dan merata. Selain itu, pemerintah desa dan kepala dusun juga terlibat aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga memperkuat sistem komunikasi program di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, berdasarkan wawancara dan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa pada indikator *actuating* (pelaksanaan), pendamping PKH telah menjalankan perannya secara efektif dalam memberikan pengarahan dan menyampaikan informasi. Penyampaian dilakukan melalui berbagai cara, baik secara langsung dalam forum kelompok maupun melalui media pesan instan, dengan dukungan dari perangkat desa yang juga aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan.

#### 4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan yaitu proses menentukan tujuan yang akan dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana harus mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat belangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan.

##### a. Pengawasan Terhadap KPM

Pengawasan merupakan kegiatan pemantauan yang bertujuan memastikan pelaksanaan suatu program sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banjar Guntung, pendamping PKH melaksanakan pengawasan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui kunjungan langsung. Pengawasan tersebut meliputi pengecekan pada komponen pendidikan dengan berkunjung ke sekolah tempat anak-anak KPM bersekolah, serta pada komponen kesehatan dengan melakukan kunjungan ke posyandu untuk memantau anak-anak usia dini atau balita. Proses ini dikenal sebagai verifikasi komitmen untuk memastikan bahwa KPM memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam program.

Selain itu, pemerintah desa melalui Sekretaris Desa juga mengonfirmasi bahwa pendamping secara rutin mengunjungi sekolah dan posyandu sebagai bentuk pemantauan terhadap pelaksanaan kewajiban peserta PKH. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap KPM telah berjalan dengan baik sesuai prosedur program. Kepala Dusun setempat juga melakukan pengawasan secara langsung kepada KPM dengan cara bertanya mengenai penggunaan dana bantuan PKH. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana bantuan tersebut dipergunakan sesuai kebutuhan, seperti pembelian susu dan kebutuhan anak-anak balita atau keperluan sekolah anak-anak. Dari perspektif KPM, pengawasan yang dilakukan oleh pendamping juga dirasakan secara nyata, di mana pendamping rutin memeriksa kehadiran peserta di posyandu dan memberi teguran apabila ada peserta yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH telah melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif melalui kunjungan dan verifikasi komitmen di posyandu dan sekolah. Selain itu, Kepala Dusun Desa Banjar Guntung turut berperan dalam pengawasan langsung kepada KPM guna memastikan dana bantuan PKH digunakan dengan bijak sesuai ketentuan program.

##### b. Memastikan Program Berjalan Sesuai Dengan Tujuan

Pemantauan dalam sebuah program sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banjar Guntung, pendamping PKH telah berupaya maksimal agar program tersebut terlaksana sesuai pedoman pelaksanaan yang berlaku. Namun, terdapat kendala terkait kesadaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ekonominya sudah meningkat tetapi belum bersedia dikeluarkan dari program. Oleh karena itu, peran pemerintah desa sangat penting dalam menangani permasalahan tersebut serta permasalahan lain seperti ketidaktepatan sasaran bantuan.

Dari sisi pemerintah desa, sekretaris desa menyatakan bahwa pelaksanaan program PKH sudah berjalan, namun belum sepenuhnya sempurna. Masih ditemukan masyarakat miskin yang memenuhi kriteria PKH tetapi belum menerima bantuan, sementara ada juga penerima yang kurang tepat sasaran, yaitu mereka yang sebenarnya mampu justru memperoleh bantuan. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dusun, yang mengakui bahwa program berjalan tetapi masih terdapat kasus

bantuan yang tidak tepat sasaran, di mana sebagian yang berhak belum mendapatkan bantuan dan sebaliknya.

Pandangan dari keluarga penerima manfaat menunjukkan bahwa program PKH secara umum sudah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi penerima. Berdasarkan hasil observasi lapangan, pendamping PKH telah berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan program berjalan cukup baik. Namun, diperlukan keterlibatan lebih lanjut dari pemerintah desa dalam hal pendataan agar proses validasi dan penyesuaian data peserta dapat berjalan lebih akurat.

Secara keseluruhan, berdasarkan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH telah melaksanakan pengawasan dengan baik terhadap aktivitas KPM dan terus berupaya mengawasi jalannya program agar sesuai dengan tujuan PKH. Meski demikian, peran pemerintah desa dalam meningkatkan koordinasi dan validasi data peserta masih menjadi faktor penting untuk menyempurnakan pelaksanaan program.

## SIMPULAN

Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Pemerintah Desa kurang selektif dalam pemilihan calon KPM, kemudian Pendamping PKH membutuhkan keterlibatan Pemerintah Desa serta Kepala Dusun dalam hal menyinkronkan data peserta PKH dengan kondisi dilapangan agar bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran pada keluarga yang benar-benar membutuhkan serta Pemerintah Desa Banjar Guntung peka terhadap peserta PKH yang ekonominya sudah layak agar dapat dihapuskan datanya oleh Pendamping PKH. Dalam hal lainnya masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantuan PKH sudah merasa terbantu dengan adanya bantuan PKH serta penyaluran dana bantuan tepat pada waktunya. Dalam melaksanakan tugasnya pendamping PKH juga berpedoman kepada pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

## DAFTAR PUSTAKA

- Huberman, Micheal dan Miles B. Matthew. 1992. Analisis Dta Kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru. UI-Pres. Jakarta
- Indonesia. (1945). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat negara. Jakarta
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Jakarta
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial (konsep-konsep kunci)*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Raco, J. R. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya Dalam Ilmu Sosial*. Grasindo. Jakarta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (19th ed.)*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Zainudin, M. 2020. Strategi Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 45-55. <https://doi.org/10.xxxx/jiis.v6i1.1234>